

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Busro, A. (2012). *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Dewi, G. S. (2020). *Hukum Agraria di Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Lubis, M. Y., & Lubis, A. R. (2008). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Murad, R. (1991). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*. Bandung: Alumni.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerodjo, I. (2002). *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*.

Surabaya: Aekola Surabaya.

Surachman, W. (1980). *Dasar Metodologi dan Teknik Research Pengantar Hukum*.

Bandung: Transito.

Sutedi, A. (2007). *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan*

Tanah untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. (2008). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar

Grafika.

_____. (2012). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016

Jurnal

Hapsari, S. D., & Hafidz, J. (2017). *Peran Notaris dalam Implementasi Asas Nemo Plus Yuris dan Itikad Baik dalam Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya*. Jurnal Akta, Vol. 4, No. 1.

Khairina. (2014). *Sertifikat Cacat Hukum dalam Hukum Pertanahan di Indonesia*. Vol. 3. No. 1.

Legianty, F. A., Yunanto, & Irawati. (2019). *Perjanjian Jual Beli Tanah yang Melanggar Asas Nemo Plus Yuris pada Pendaftaran Tanah*. Notarius, Vol. 12, No. 2.

Loekito, M. A., Silviana, A., & Triyono. (2016). *Pembatalan Sertipikat Hak Milik yang Mengandung Cacat Formalitas dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 335/Pdt/2013/PT.Smg)*. Vol. 5. No. 4.

Yanto, N. E., & Prianto, Y. (2018). *Implementasi Asas Nemo Plus Yuris sebagai Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pembatalan Sertipikat Nomor 2690/Kebon Kelapa)*. Vol. 16. No. 1.

Internet

<https://sidomulyo-ampel.desa.id/profildesa-48-Demografi.Penduduk.html>

LAMPIRAN

1. Gambar Obyek Tanah



2. Gambar Wawancara dengan Bapak Suprayogo selaku Kepala Seksi Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali



**3. Wawancara dengan Bapak Sawali selaku Kepala Desa Sidomulyo,
Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali**

